

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di Jawa Barat periode 2013 triwulan pertama – 2017 triwulan pertama menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari uji F-statistik dapat diketahui bahwa secara bersamaan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pada enam BPRS di Jawa Barat selama periode 2013 triwulan pertama – 2017 triwulan pertama dipengaruhi oleh FDR, CAR, *Bank Size* dan Inflasi.. Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 11% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian.
2. Secara parsial, dapat dinyatakan sebagai berikut:
  - a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Jawa Barat, karena saat FDR naik tidak selalu diikuti dengan kenaikan NPF. Ada

kalanya saat FDR naik justru NPF-nya turun, namun ada kalanya ketika FDR naik NPF juga ikut naik

- b. *Bank size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Jawa Barat, maka ketika terjadi kenaikan rasio *Bank Size* lantas rasio NPF akan mengalami penurunan signifikan.
- c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Jawa Barat, karena pada saat CAR naik tidak selalu diikuti dengan kenaikan NPF. Ada kalanya saat CAR naik justru NPF-nya turun, namun ada kalanya ketika CAR naik NPF juga ikut naik
- d. *Inflasi* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Jawa Barat, karena pada saat inflasi naik tidak selalu diikuti dengan kenaikan NPF. Ada kalanya saat inflasi naik justru NPF-nya turun, namun ada kalanya ketika inflasi naik NPF juga ikut naik

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. BPRS di Jawa Barat sebaiknya lebih menjaga kualitas pembiayaannya karena NPF pada BPRS di Jawa Barat tergolong tinggi dengan penyaluran dana yang tinggi juga. Bila hal ini terjadi terus-menerus akan memperburuk kondisi keuangan BPRS di Jawa Barat.
2. BPRS di Jawa Barat Menjaga tingkat kecukupan modal merupakan tindakan yang sebaiknya selalu dilaksanakan oleh pihak bank. Tidak hanya untuk kualitas yang baik dari kinerja bank namun juga meminimalan risiko usaha termasuk risiko pembiayaan bermasalah.
3. BPRS di Jawa Barat sebaiknya memperbaiki manajemen permodalannya sehingga dengan sumber daya modal yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk mendaangkan keuntungan dan memperbaiki kualitas pembiayaan yang disalurkan.
4. Pemerintah Jawa Barat diharapkan untuk menjaga tingkat inflasi yang stabil agar tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja bank sebagai lembaga perantara keuangan sehinggadapat meminimalkan risiko usaha termasuk risiko pembiayaan bermasalah.

5. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya memberikan peraturan yang sangat ketat agar seluruh BPRS di Indonesia melaporkan laporan keuangannya secara rinci, agar proses transparansi kepada masyarakat semiakin baik.
6. Bagi Badan Pusat Statistik (BPS) sebaiknya melakukan pembaharuan setiap bulan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan info data-data terkini.